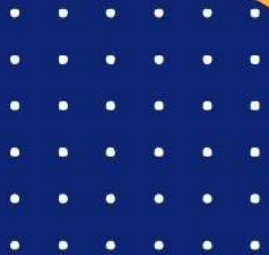




KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan berdasarkan perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kota Pekanbaru selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Pekanbaru.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pekanbaru, 05 Februari 2026

CAMAT MARPOYAN DAMAI

KOTA PEKANBARU



FAUZAN, S.STP.,M.Si

NIP. 19800202 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 KELEMBAGAAN	2
1.4 SUMBER DAYA APARATUR.....	19
1.5 SARANA DAN PRASARANA.....	22
1.6 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	26
1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RENCANA STRATEGIS	28
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	29
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024	37
3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023 (TAHUN SEBELUMNYA)	50
3.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	54
3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	55
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA	55
3.6 REALISASI ANGGARAN	75
BAB IV PENUTUP	80
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LKjIP Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pada Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian Kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Marpoyan Damai. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

1.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kecamatan Marpoyan Damai, kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.3.1 Gambaran Umum Kecamatan

Perubahan yang sangat mendasar terhadap pemerintahan di daerah adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian diikuti pula oleh keluarnya berbagai peraturan pelaksanaannya sampai ke tingkat daerah.

Sehingga menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Organisasi Pemerintahan

Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, berarti telah terjadi perubahan sistem pemerintahan daerah dari paradigma sentralistik ke desentralistik. Perubahan paradigma pemerintahan termasuk pada pemerintahan kecamatan dalam hal kewenangan. Ini membawa implikasi terhadap pemerintahan kecamatan, termasuk kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu perubahan yang paling prinsip menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan.

Pada pasal 66 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Camat menerima pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota”. Hal tersebut menjelaskan bahwa camat mempunyai kewenangan delegatif. Dengan kata lain, tanpa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati/Walikota kepada Camat, Maka Camat tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi Camat melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 6 kelurahan, dengan luas wilayah 29,79 Km². Luas wilayah per kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.
Luas wilayah Kelurahan
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

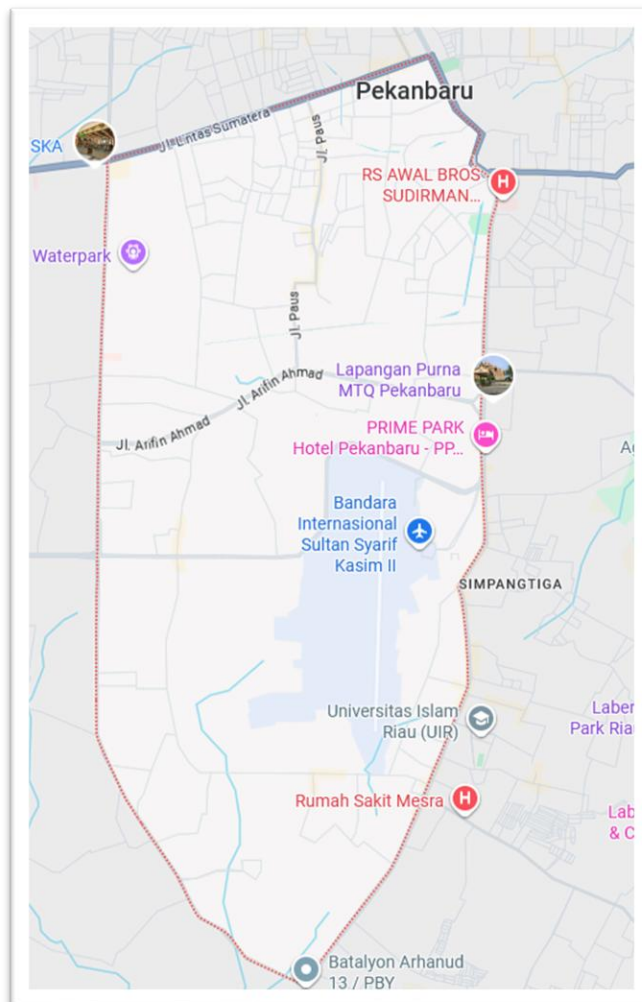
No.	Kelurahan	Luas (Km2)
1.	Tangkerang Tengah	4,64
2.	Tangkerang Barat	5,35
3.	Wonorejo	1,35
4.	Sidomulyo Timur	7,19
5.	Perhentian Marpoyan	4,34
6.	Maharatu	6,92

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai, 2025.

Batas-batas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai secara administrasi berbatasan langsung dengan 3 kecamatan dan 1 kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Binawidya;
- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Gambar 1.1.
Peta Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025



Kecamatan Marpoyan Damai merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, dan Rumbai Persisir.

Sebagai Pusat Pemerintahan, Kecamatan Marpoyan Damai memiliki total jumlah penduduk sampai dengan Juni 2022 berjumlah 147.033 jiwa, yang tersebar di 6 (enam) kelurahan yang di bawahi oleh Kecamatan Marpoyan Damai.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Camat mempunyai rincian tugas sebagai-berikut :

- a. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi ;
 - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
 - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
- c. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - ✓ Perijinan
 - ✓ Rekomendasi
 - ✓ Koordinasi
 - ✓ Pembinaan
 - ✓ Pengawasan
 - ✓ Fasilitas
 - ✓ Penetapan
 - ✓ Penyelenggaraan
 - ✓ Dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

2. Fungsi

Secara umum fungsi pokok Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari :

➤ **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat Marpoyan Damai dibantu oleh perangkat Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat dibantu :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Terpadu
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelurahan

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Perangkat Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

➤ **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif; menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administrative untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- g. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Pembuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- k. Pengevaluasian tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan teknis administratif;
- b. Perencanaan program kerja kecamatan;
- c. Koordinasi tugas administrasi;
- d. Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan;
- e. Pengevaluasian tugas pemerintahan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan kelurahan;
- d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan;
- i. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;
- j. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

- o. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub Bagian Umum;
- b. Perumusan data kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan dalam;
- d. Pelaksanaan kebutuhan materiil;
- e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan;
- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas;
- i. Pengevaluasian tugas Sub Bagian Umum
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

- e. Pelaksanaan Verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
- j. merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga sekretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan verifikasi;
- c. Penyiapan surat perintah membayar;
- d. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan;

- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- i. Pengevaluasian tugas;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- k. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Ketentraman Dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. Pengoordinasian urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain, yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

- j. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
- b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksana pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan Motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Pengoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;

- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan Kesehatan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Pelayanan Terpadu**

Kepala Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai rincian tugas :

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- d. Pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

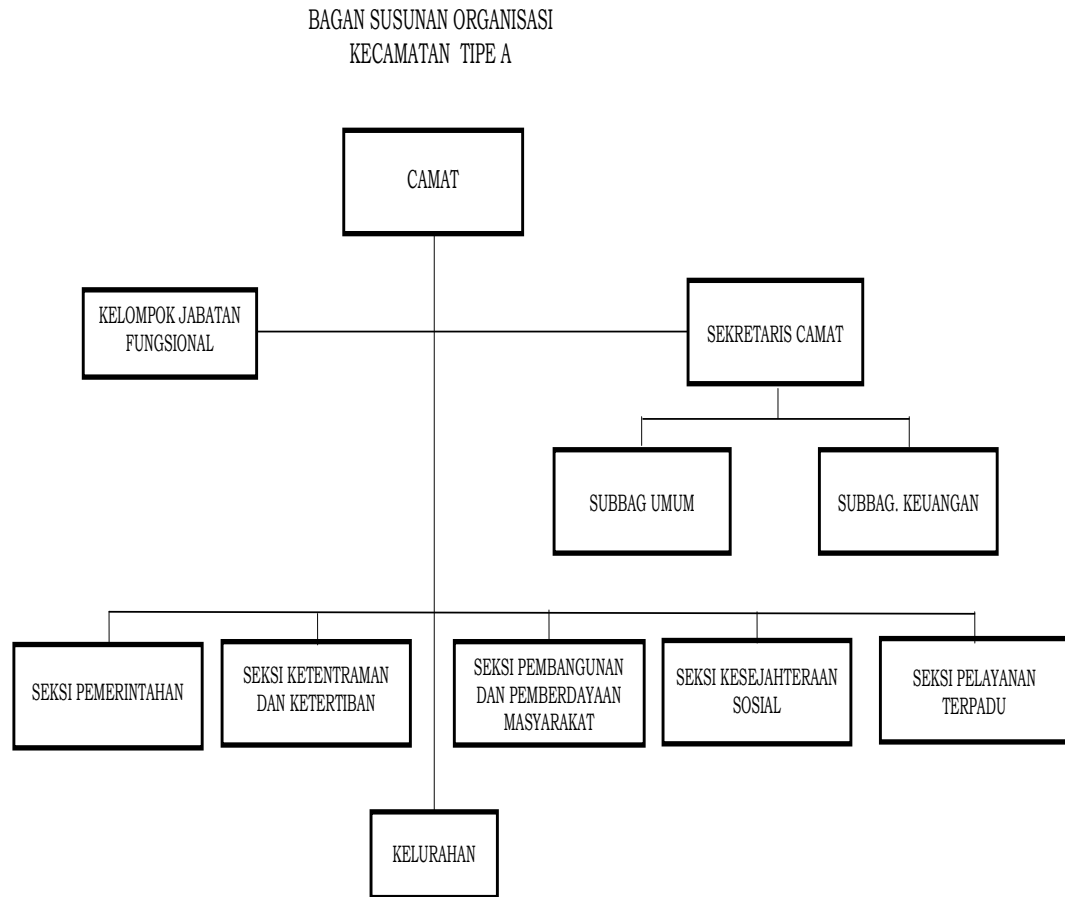
Kepala Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum;
- b. Koordinasi urusan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum;
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (terlampir).

Gambar 1.2.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan



(Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru)

Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Camat | : Fauzan, S.STP., M.Si |
| 2. Sekretaris Camat | : Defna Leony, S.IP, M.Si |
| a. Kasubbag Umum | : Befliza, S.Sos |
| b. Kasubbag Keuangan | : Hj. Erly Yanti, SE |
| 3. Kasi Pemerintahan | : - |

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban : Donny Akbar, S.E
5. Kasi Pembangunan Dan : Sri Utami H Wirba, S.IP, M.M
Pembangunan Masyarakat
6. Kasi Kesejahteraan Sosial : Yeni Hartati, SKM
7. Kasi Pelayanan Terpadu : Nico Chandra, S.Kom
8. Jabatan Fungsional
9. Kelurahan

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah personil Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru per 31 Desember 2024 berjumlah 58 orang, dikualifikasikan berdasarkan pangkat / golongan dan pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/ Esselonering.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 57 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 5 (lima) kelompok sebagaimana data pada tabel 1.2.berikut ini :

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai
Menurut Jabatan Tahun 2025

NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH KEBUTUHAN (orang)	JUMLAH YANG ADA SAAT INI (orang)
Kecamatan Marpoyan Damai			
1.	Eselon III a	1	1
2.	Eselon III b	1	1
3.	Eselon IV a	5	4
4.	Eselon IV b	2	2
5.	Staf/Non Struktural	15	15
Kelurahan Tangkerang Tengah			

NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH KEBUTUHAN (orang)	JUMLAH YANG ADA SAAT INI (orang)
6.	Eselon IV a	1	1
7.	Eselon IV b	4	1
8.	Staf/Non Struktural	4	4
Kelurahan Tangkerang Barat			
9.	Eselon IV a	1	1
10.	Eselon IV b	4	4
11.	Staf/Non Struktural	4	3
Kelurahan Maharatu			
12.	Eselon IV/a	1	1
13.	Eselon IV/b	4	3
14.	Staf/Non Struktural	3	2
Kelurahan Wonorejo			
15	Eselon IV a	1	1
16	Eselon IV b	4	3
17	Staf/Non Struktural	4	2
Kelurahan Sidomulyo Timur			
18	Eselon IV/a	1	0
19	Eselon IV/b	4	2
20	Staf/Non Struktural	4	2
Kelurahan Perhentian Marpoyan			
21	Eselon IV/a	1	1
22	Eselon IV/b	4	4
23	Staf/Non Struktural	4	0
JUMLAH		77	57

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Marpoyan Damai 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari kondisi pegawai kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 57 orang ternyata masih membutuhkan 20 orang staf yang tentunya akan dapat mengoptimalkan kinerja Kecamatan Marpoyan Damai, maka pengisian formasi pegawai sangat dibutuhkan.

b. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Non Formal.

Dari data pada tabel 1.2. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai adalah didominasi oleh tingkat Pendidikan S2, S1, D4, D3 dan SMA.

Tabel 1.3.

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan
Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (org)	%
1.	Sarjana Strata III (S.3)	0	0 %
2.	Sarjana Strata II (S.2)	11	18,97 %
3.	Sarjana Strata I (S.1) / Diploma IV	30	51,72%
5.	Diploma III	5	8,62 %
6.	SLTA Sederajat	11	20,69 %
7.	SLTP	0	0 %
8.	SD	0	0 %
JUMLAH		57	100 %

Sumber: Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025

Tabel 1.4.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai
Menurut Pendidikan Non Formal Tahun 2025

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (org)	%
1.	Diklat	3	20 %
2.	Bimtek	12	80 %
3.	Pendidikan lainnya	0	0 %
JUMLAH		15	100 %

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Kecamatan Marpoyan Damai pada tabel diatas masih memerlukan tambahan Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sebagai pemacu pelaksanaan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Marpoyan Damai.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya aparatur, keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan kantor Kecamatan Marpoyan Damai. Adapun sarana dan prasarana yang menjadi asset/ modal Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 1.5.
Komposisi Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2025
Kecamatan Marpoyan Damai

NO.	BARANG INVENTARIS	LUAS/ JUMLAH	KETERANGAN
A	Tanah		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Arifin Ahmad	4.554 M ²	Kantor Camat Marpoyan Damai
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Adi Sucipto	240 M ²	Kantor Lurah Sidomulyo Timur

NO.	BARANG INVENTARIS	LUAS/ JUMLAH	KETERANGAN
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Gulama	1.000 M ²	Kantor Lurah Tangkerang Barat
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Garuda Ujung	625 M ²	Kantor Lurah Tangkerang Tengah
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Saus No. 01	192 M ²	Kantor Lurah Wonorejo
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Kartama	1.001 M ²	Kantor Lurah Maharatu
7	Tanah Bangunan Pembibitan Jl. Firdaus – Kel. Maharatu	180 M ²	Hibah Tanah Tahun 2020 Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
8	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan Jl. Saus No.1	520 M ²	Balai Desa Kelurahan Wonorejo
9	Tanah Lapangan Sepak Bola Jl. Saus No.1	520 M ²	Lapangan Bola di Kelurahan Wonorejo
B	Gedung dan Bangunan		
10	Gedung Kantor Permanen Jl Arifin Ahmad	500 M ²	Kantor Camat Marpoyan Damai
11	Gedung Kantor Permanen Jl Adi Sucipto	244 M ²	Kantor Lurah Sidomulyo Timur
12	Gedung Kantor Permanen Jl Gulama	500 M ²	Kantor Lurah Tangkerang Barat
13	Gedung Kantor Permanen Jl Garuda	195 M ²	Kantor Lurah Tangkerang Tengah
14	Gedung Kantor Permanen Jl Saus	192 M ²	Kantor Lurah Wonorejo
15	Gedung Kantor Permanen Jl Kartama	150 M ²	Kantor Lurah Maharatu
C	Peralatan dan Mesin		
16	PC Unit	35	
17	Laptop	2	
18	Note Book	4	
19	Printer	39	-
20	Scanner	2	
21	Mini Bus	2	-
22	Pick Up	2	-
23	Sepeda Motor	11	
24	Bemo	2	
25	Bak Air	1	

NO.	BARANG INVENTARIS	LUAS/ JUMLAH	KETERANGAN
26	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Bankeu TA 202
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	19	
28	Mesin Ketik Manual Portable (14-16 inci)	5	
29	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	5	
30	Lemari Sorok	1	
31	Lemari Kaca	1	
32	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	9	
33	Rak Kayu	1	
34	Filling Cabinet Besi	49	
35	Brandkas	1	
36	Mesin Absensi	1	
37	CCTV - Camera Control Television System	2	
38	Papan Visual/ Papan Nama	4	
39	LCD Proyektor	1	
40	Layar LCD Proyektor	1	
41	Papan Nama Instansi	1	
42	Alat Kantor Lainnya	2	
43	Peta	1	
44	Meja Podium	1	
45	Meja Panjang	1	
46	Meja Kerja Kayu	21	
47	Meja ½ Biro	45	
48	Kursi Tamu	14	
49	Kursi Putar	21	
50	Bangku Tunggu	7	
51	Meja Komputer	6	
52	Sofa	5	
53	Meja Rapat	2	

NO.	BARANG INVENTARIS	LUAS/ JUMLAH	KETERANGAN
54	A.C. Window	4	
55	A.C. Split	15	
56	Wireless	1	
57	Televisi	14	
58	Stabilisator	3	
59	Tape Recorder	1	
60	Tangki Air	2	
61	Sound System	1	
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23	
64	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	10	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	
67	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2	
68	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	57	
69	Microphone/Wireless MIC	1	
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
71	Layar Film/Projector	1	
72	Facsimile	2	
73	Handy Talky (HT)	6	
74	Infrared Thermometer	14	

Sumber : Simadani Kecamatan Marpoan Damai per 31 Desember 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang masih kurang serta kondisi yang sudah rusak. Demi pelaksanaan kinerja yang optimal tentunya dibutuhkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan setiap tahunnya.

1.6 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI KECAMATAN

MARPOYAN DAMAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- Masih minimnya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas.
- Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan
- Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal.
- Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal

Dari kondisi tersebut diatas yang menjadi isu strategis di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM Aparatur
- Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 1.6.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Pelayanan	Faktor yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)
Masih minimnya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas	- Kemauan meningkatkan pendidikan oleh pegawai masih rendah - Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	- Motivasi pegawai dalam pelaksanaan tugas sesuai tupoksi sangat tinggi - Melakukan analisis jabatan sesuai kebutuhan dan faktor pendidikan
Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan	- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja kecamatan - Rendahnya teknologi yang menjadi penunjang pelaksanaan pelayanan	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada

Permasalahan Pelayanan	Faktor yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal	Sinergitas yang rendah oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan	Komitmen yang tinggi oleh seluruh stakeholder untuk melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan
Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal	Pemahaman terhadap Standar Operasional Pelayanan masih rendah	Adanya komitmen Bersama dalam mewujudkan program pembangunan di Kecamatan

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai Periode Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN,

Berisi Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Kecamatan dan Sistematika Penyusunan LKJIP Kecamatan Marpoyan Damai

II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2024

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat pencapaian sasaran – sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mempunyai rencana strategis sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya akan melaksanakan rencana program yang telah dirancang untuk 4 (empat) tahun kedepan yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Pekanbaru serta dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2023-2026 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Marpoyan Damai adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran

strategis tujuan Renstra Perubahan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan ke -1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

- Tujuan ke – 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Tujuan ke – 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Periode Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas fungsi organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan strategis. Sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini

Tabel 2.2 :Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Marpoyn Damai Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KRITERIA PENGUKURAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Nilai	Memenuhi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kecamatan	Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi : 1. Bidang Pemerintahan 2. Bidang Kewilayahan 3. Bidang Kemasyarakatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Memenuhi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Rata-rata IKM Kecamatan	Survei IKM oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru	Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Prilaku Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan saran dan masukan

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Marpoyan Damai	Nilai	Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20214 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Marpoyan Damai	Inpektorat Daerah	Semakin tinggi penilaian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru maka semakin tinggi Kualitas Kinerja
---	------------------------------------	---	-------	--	-------------------------------------	-------------------	---

Berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran jangka menengah yang ada pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru maka telah ditetapkan tolak ukur target kinerja untuk Periode 2023-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 :Penetapan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Nilai	NA*	210	220	230	240	240
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	83	83,41	84	85	87,5	87,5
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	B	B	B	B	BB	BB

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Tingkat Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	230
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	B

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program berikut :

Tabel 2.5
Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru Tahun 2025

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12.144.958.083
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.382.980
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.708.941.100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.998.825.251
	JUMLAH	17.864.607.414

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Laporan LKJIP Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Periode 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Marpoyan Damai diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pengukuran kinerja membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD

tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maka disusunlah program dan kegiatan untuk mendukung capaian sasaran strategis. Untuk mencapai

sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dari sasaran sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun capaian kinerja Kecamatan Marpojan Damai Kota Pekanbaru tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Marpojan Damai Kota Pekanbaru
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	230	227	98,69%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85	84,39	99,28%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	67,54 (B)	67,40 (B)	99,79%
Rata-Rata Capaian						99,25%

Dari tabel 3.1 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Marpojan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025 mendapatkan predikat **Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian indikator kinerja senilai **99,25**

A. Sasaran Strategis

Analisis terhadap tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disajikan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis I :
*Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.***

Capaian sasaran strategis yang **pertama** dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*** diukur dengan formula pengukuran sebagai berikut

Memberikan penilaian pada sub indikator Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kemudian melakukan penghitungan poin total dari sub indikator masing-masing kelurahan dan mengklasifikasikan poin kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut :

No	Poin	Kategori
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

Capaian sasaran strategis yang pertama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis yang Pertama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja %
SS1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Nilai	230	227	98,69

Adapun penilaian pada nilai perkembangan Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penilaian Nilai Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Bidang Penilaian	Skor Penilaian
1	2	3
1	Bidang Pemerintahan	75
2	Bidang Kewilayahan	75
3	Bidang Kemasyarakatan	77
JUMLAH		227

Sumber : Laporan Hasil Pengisian Instrumen Pengungkapan Data dan Nilai Perkembangan Kecamatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.3 diatas nilai perkembangan pembangunan kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah **227** sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 adalah **230** sehingga capaian untuk indikator ini adalah **98,69%**

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini, perlu dilakukan beberapa upaya memaksimalkan isu-isu utama dalam pembangunan kecamatan, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan; yaitu terlaksananya usulan musrenbang yang menjadi prioritas di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kota

2. Bidang kewilayahan; yaitu program pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan sosial kemasyarakatan
3. Bidang kemasyarakatan; yaitu pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan/ pemberdayaan masyarakat . Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin mendorong kemajuan suatu daerah.

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	46.020.170	45.880.400	99,70
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	46.020.170	45.880.400	99,70
			Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	0
			Evaluasi kelurahan	-	-	0
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62

Sasaran Strategis II :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian sasaran strategis yang **kedua** dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***. Untuk mengukur sasaran ini, diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator dari sasaran strategis yang kedua disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator dari Sasaran Strategis Kedua

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja %
SS2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	85	84,39	99,28

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur seberapa besar kualitas layanan Kecamatan Marpoyan Damai yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Pertengahan semester 1 dan Pertengahan semester 2 di tahun 2025 yang bersumber dari Belanja Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Interval Konversi
U1	Persyaratan Pelayanan	80,83
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	80,83
U3	Waktu Penyelesaian	78,88
U4	Biaya/Tarif	97,57
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	82,28
U6	Kompetensi Pelaksanaan	80,83
U7	Perilaku Pelaksana	84,22
U8	Penanganan, Pengaduan Saran a dan Masukan	77,91
U9	Sarana dan Prasarana	96,12
	IKM	84,39
	Mutu	B

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2025 (Bagian Organisasi Tata Laksanaan Sekda Kota Pekanbaru)

Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru memperoleh nilai IKM **84,39** dan secara mutu pelayanan nilai yang didapat adalah **B**

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, unsur pelayanan pada Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang memperoleh nilai tertinggi adalah Unsur Biaya dengan nilai 97,57. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah Unsur Penanganan, Pengaduan Saran a dan Masukan dengan nilai 77,91.

Unsur priortitas perbaikan yang disarankan adalah:

1. Unsur 3 : Waktu Penyelesaian;

Menyusun SOP terkait waktu penyelesaian pelayanan serta menciptakan inovasi dengan menggunakan teknologi tepat sehingga proses pelayanan yang sebelumnya memakan waktu lama dapat disederhanakan.

2. Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Menciptakan inovasi penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan berbasis teknologi dengan cara melakukan *scan barcode* penilaian pelayanan setelah pelayanan selesai dilakukan. Masyarakat dapat memberikan penilaian, kritik dan saran atas pelayanan yang telah dilakukan oleh petugas.

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Marpoan Damai di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Sasaran Strategis II Indikator IKM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.365.655.016	8.141.467.477	97,32
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.359.055.896	8.134.946.477	97,32
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.073.000	3.021.000	98,31
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3.526.120	3.500.000	99,26
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.750.000	1.750.000	100

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.750.000	1.750.000	100
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.100.000	46.500.000	94,23
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	13.600.000	100
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.698.000	30.516.367	87,95
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.173.700	708.801.010	95,12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	32.400.950	30.735.500	94,86
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.294.720	31.200.000	99,70
			Penyediaan bahan logistik kantor	584.477.940	558.669.000	95,58
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.860.090	54.004.710	94,98
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	0

			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.140.000	34.191.800	85,18
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.957.700	204.957.700	100
			Pengadaan Mebel	-	-	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.957.700	204.957.700	100
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	691.003.656	662.726.628	95,91
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	189.857.424	186.878.330	98,43
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.380.000	6.360.000	99,69
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	494.766.232	469.488.298	94,89

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.630.000	111.312.866	90,77
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.160.000	87.842.866	88,59
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.399.981.550	1.390.737.632	99,34
			Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	0	0	0
			Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1.246.981.550	1.237.737.632	99,26

			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	153.000.000	153.000.000	100
--	--	--	--	-------------	-------------	-----

Sasaran Strategis III :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Capaian sasaran strategis yang **ketiga** dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja***. Untuk mengukur sasaran ini, diukur dengan Nilai AKIP Kecamatan

Capaian indikator dari sasaran strategis yang ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator dari Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja %
SS3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	67,54 (B)	67,40 (B)	99,79

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu dilakukan evaluasi agar dapat mendorong instansi pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan implementasi

SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai dengan Renstra Perubahan 2023-2026 Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Nomor: B.700/INSPEKTORAT-IRBAN I/38/2025 Tanggal 26 Juni 2025, evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	09,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Jumlah		100,00	67,40
Kategori			B

Sumber : LHE Nomor : B.700/INSPEKTORAT-IRBAN I/38/2025

Berdasarkan tabel 3.9, nilai AKIP Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah **67,54 (B)**, sedangkan target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2023-2026 adalah **67,40 (B)**, sehingga realisasi capaian untuk indikator ini telah memenuhi target yang ditentukan dengan persentase capaiannya adalah 99,79%.

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Marpoyan Damai di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10

Program dan Kegiatan Sasaran Strategis III Indikator AKIP Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.100.000	14.100.000	100
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.550.000	2.550.000	100
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.550.000	6.550.000	100
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	0
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100

3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024

(TAHUN SEBELUMNYA)

Untuk melihat persentase performa kinerja OPD Kecamatan Marpoyan Damai maka disusunlah tabel perbandingan capaian kinerja kecamatan marpoyan damai tahun 2025 dan

tahun 2024 (tahun sebelumnya). Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun perbandingan capaian kinerja Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Menurut Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			KINERJA LEBIH BAIK
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	220	215	98	230	227	98,69	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84	93,17	111	85	84,39	99,28	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	100	B	B	99,79	
Rata-Rata Capaian Kinerja				103			98.69			
Performa Capaian Kinerja				95,81%						

Sumber : Data Olahan Kecamatan Marpoyan Damai

Tabel 3.11 diatas menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian kinerja tahun 2025 adalah senilai 98,69%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 senilai 103%. Kinerja lebih baik pada tahun 2025 adalah 95,81%.

A. Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan sebesar 220 dengan realisasi sebesar 215 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 98 %. Tahun 2025 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan sebesar 230 dengan realisasi sebesar 227 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 98,69 %. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami kenaikan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 100%

B. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 84 dengan realisasi sebesar 93,17 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 111%. Tahun 2025 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 85 dengan realisasi sebesar 84,39 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,28%. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami penurunan. Capaian kinerja lebih buruk dari tahun sebelumnya senilai 89,44%.

C. Nilai AKIP Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai AKIP Kecamatan adalah B dengan realisasi B. Tahun 2025 Kecamatan Marpoyan Damai menargetkan Nilai AKIP Kecamatan adalah 67,54 (B) dengan realisasi 67,40 (B). sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,79%.

3.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH

Untuk mengetahui perbandingan kinerja Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Perubahan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2023-2026, ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 dengan Target Renstra Perubahan 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA 2026	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	227	240	94,58%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,39	87,5	96,44%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	67,40 B	70 BB	96,28%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (AKHIR RENSTRA 2026)					95,76%

Tabel 3.12 menyajikan perbandingan kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah atau akhir periode Renstra yakin tahun 2023-2026. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2025 terhadap target jangka menengah atau akhir periode Renstra adalah 95,76%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dirumuskan rencana aksi agar target akhir periode Renstra bisa tercapai dengan minimal rata-rata capaian 100% pada tahun 2026 nanti. Adapun hal-hal teknis yang akan dilakukan pada Rencana Aksi akan disampaikan pada Rencana Aksi terhadap Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah periode ini.

3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan. Adapun factor-faktor penyebabnya adalah:

- a. Program dan kegiatan yang telah ditopang dengan ketersediaan anggaran Kecamatan Marpoyan Damai;
- b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia.

Hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan;
- b. Masih kurangnya inovasi dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat;
- c. Masih kurangnya sumber daya manusia petugas pelayanan yang berkompeten.

Strategi pemecahan masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:

- a. Menyusun SOP terkait pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan, baik pelatihan di kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan Teknis di tempat lainnya.

3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output

yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Untuk menghitung nilai efisiensi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Output} : \text{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase perhitungan realisasi fisik

Input : Realisasi anggaran

Kriteria efisiensi adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($\chi < 100\%$) berarti tidak efisien
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($\chi = 100\%$) berarti efisien berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($\chi > 100\%$) berarti efisien

Tabel 3.13

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome : Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	95	10.193.568.072	9.889.232.048	97,01	97,92	Tingkat efisiensi sebesar 97,92% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 97,01%, tetapi capaian kinerja mencapai 95%
2.01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	14.100.000	14.100.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100	2.550.000	2.550.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
06	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	6.550.000	6.550.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
07	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0 Laporan	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
08	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
09	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Data	6 Data	100	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	8.365.655.016	8.141.467.477	97,32	102,75	Tingkat efisiensi sebesar 102,75% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 97,32%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	85	8.359.055.896	8.134.946.477	97,32	87,34	Tingkat efisiensi sebesar 87,34% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 97,32%, tetapi capaian kinerja mencapai 85%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	3.073.000	3.021.000	98,31	101,72	Tingkat efisiensi sebesar 101,72% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,31%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	3.526.120	3.500.000	99,26	100,75	Tingkat efisiensi sebesar 100,75% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,26%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
2.03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%
05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	1.750.000	1.750.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
2.05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	44.116.367	44.116.367	91,34	109,48	Tingkat efisiensi sebesar 109,48% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 91,34%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100	13.600.000	13.600.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang melakukan Bimbingan Teknis	3 Orang	3 Orang	100	34.698.000	30.516.367	87,95	113,70	Tingkat efisiensi sebesar 113,70% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 87,95%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	745.173.700	708.801.010	95,12	105,13	Tingkat efisiensi sebesar 105,13% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 95,12%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	32.400.950	30.735.500	94,86	105,42	Tingkat efisiensi sebesar 105,42% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,86%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	31.294.720	31.200.000	99,70	100,30	Tingkat efisiensi sebesar 100,30% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,70%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100	584.477.940	558.669.000	95,58	104,62	Tingkat efisiensi sebesar 104,62% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 95,58%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	56.860.090	54.004.710	94,98	105,29	Tingkat efisiensi sebesar 105,29% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,98%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%
09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	9 Laporan	64	40.140.000	34.191.800	85,18	75,13	Tingkat efisiensi sebesar 75,13% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 85,18%, tetapi capaian kinerja mencapai 64%
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
2.07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	204.957.700	204.957.700	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%
06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100	204.957.700	204.957.700	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.08	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	691.003.656	662.726.628	95,91	104,27	Tingkat efisiensi sebesar 104,27% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 95,91%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100	189.857.424	186.878.330	98,43	101,59	Tingkat efisiensi sebesar 101,59% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,43%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	6.380.000	6.360.000	99,69	100,31	Tingkat efisiensi sebesar 100,31% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,61%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	494.766.232	469.488.298	94,89	94,89	Tingkat efisiensi sebesar 94,89% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,89%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.09	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	122.630.000	111.312.866	90,77	110,17	Tingkat efisiensi sebesar 110,17% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 90,77%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100	99.160.000	87.842.866	88,59	112,88	Tingkat efisiensi sebesar 112,88% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 88,59%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki	35 Unit	35 Unit	100	23.470.000	23.470.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Outcome : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan, Pelayanan Publik yang dilaksanakan				-	-			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
2.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Output : Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	-			
01	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-	-			
03	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	-			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
03	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Outcome : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	90%	90%	100	3.632.745.170	3.152.822.000	86,79	115,22	Tingkat efisiensi sebesar 115,22% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 86,79%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.02	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Output : Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100	46.020.170	45.880.400	99,70	100,30	Tingkat efisiensi sebesar 100,30% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,70%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
01	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Output: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasya-rakatan	7 Lembaga Kemasya-rakatan	100	46.020.170	45.880.400	99,70	100,30	Tingkat efisiensi sebesar 100,30% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,70%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
2.03	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Output : Jumlah Laporan Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	414 Lembaga Kemasya-rakatan	414 Lembaga Kemasya-rakatan	100	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62	115,44	Tingkat efisiensi sebesar 115,44% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 86,62%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
02	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Output : Jumlah terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	414 Lembaga Kemasya-rakatan	414 Lembaga Kemasya-rakatan	100	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62	115,44	Tingkat efisiensi sebesar 115,44% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 86,62%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Outcome : Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	0	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%
2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	0 Laporan	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%
01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Output :Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 Laporan	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Outcome : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan	90%	90%	100	1.399.981.550	1.390.737.632	99,34	100,66	Tingkat efisiensi sebesar 100,66% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,34%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
2.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Output : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.399.981.550	1.390.737.632	99,34	100,66	Tingkat efisiensi sebesar 100,66% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,34%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	0 Orang	0	-	-	0,00	0,00	Tingkat efisiensi sebesar 0% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 0%, tetapi capaian kinerja mencapai 0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			EFISIENSI	KETERANGAN
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%	
07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Output : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1.246.981.550	1.237.737.632	99,26	100,75	Tingkat efisiensi sebesar 100,75% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,26%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
08	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Output : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	153.000.000	153.000.000	100,00	100,00	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							15.226.294.792	14.432.791.680			

3.6 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Marpoyan Damai sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025			Tahun Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	15.226.294.792	14.432.791.680	94,81	15.019.918.773	14.350.788.173	95,55
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.189.386.439	9.889.232.048	97,05	9.516.348.427	9.185.622.269	96,52
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.100.000	14.100.000	100,00	12.865.600	12.552.000	97,56
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	100,00	4.814.400	4.710.000	97,83
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.550.000	6.550.000	100,00	4.407.800	4.303.000	97,62
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00	3.643.400	3.539.000	97,13
07	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	-	-	0,00
07	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	-	-	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025			Tahun Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.365.655.016	8.141.467.477	97,32	7.578.669.877	7.575.560.240	99,96
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.359.055.896	8.134.946.477	97,32	7.570.115.477	7.568.894.240	99,98
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.073.000	3.021.000	98,31	4.427.200	3.938.000	88,95
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.526.120	3.500.000	99,26	4.127.200	2.728.000	66,10
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.750.000	1.750.000	100,00	7.093.000	6.733.000	94,92
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00	3.514.200	3.409.000	97,01
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.750.000	1.750.000	100,00	3.578.800	3.324.000	92,88
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.298.000	44.116.367	91,34	65.100.000	46.500.000	71,43
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.600.000	13.600.000	100,00	65.100.000	46.500.000	71,43
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.698.000	30.516.367	87,95			
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.173.700	708.801.010	95,12	659.803.074	655.364.880	99,33
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	32.400.950	30.735.500	94,86	49.997.700	49.902.300	99,81
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.294.720	31.200.000	99,70			
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	584.477.940	558.669.000	95,58	487.896.800	485.854.400	99,58
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.860.090	54.004.710	94,98	51.237.054	51.138.000	99,81
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0,00	8.400.000	8.400.000	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025			Tahun Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.140.000	34.191.800	85,18	57.574.000	55.485.180	96,37
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0,00	4.697.520	4.585.000	97,60
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.957.700	204.957.700	100,00	285.768.400	79.009.000	27,65
05	Pengadaan Mebel	-	-	0,00	49.388.400	49.150.000	99,52
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00	30.000.000	29.859.000	99,53
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.957.700	204.957.700	100,00	206.380.000	-	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.003.656	662.726.628	95,91	816.417.676	742.660.322	90,97
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.857.424	186.878.330	98,43	263.317.044	225.401.330	85,60
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.380.000	6.360.000	99,69	26.152.400	25.658.000	98,11
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.766.232	469.488.298	94,89	526.948.232	491.600.992	93,29
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.630.000	111.312.866	90,77	90.630.800	67.242.827	74,19
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0,00	90.630.800	67.242.827	74,19
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.160.000	87.842.866	88,59	-	-	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.470.000	23.470.000	100,00	-	-	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025			Tahun Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	-	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-		-	-	
01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-		-	-	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-		-	-	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.632.745.170	3.152.822.000	86,79	3.593.062.160	3.574.589.200	99,49
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	46.020.170	45.880.400	99,70	46.938.960	46.573.000	99,22
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.020.170	45.880.400	99,70	46.938.960	46.573.000	99,22
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-		-	-	
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62	3.546.123.200	3.528.016.200	99,49
02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.586.725.000	3.106.941.600	86,62	3.546.123.200	3.528.016.200	99,49
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	0,00	250.000.000	-	0,00
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0,00	250.000.000	-	0,00
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	0,00	250.000.000	-	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2025			Tahun Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.399.981.550	1.390.737.632	99,34	1.660.508.186	1.590.576.704	95,79
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.399.981.550	1.390.737.632	99,34	1.660.508.186	1.590.576.704	95,79
03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	0,00	100.000.000	100.000.000	100,00
07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.246.981.550	1.237.737.632	99,26	1.412.008.186	1.350.326.704	95,63
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	153.000.000	153.000.000	100,00	148.500.000	140.250.000	94,44

Dari tabel diatas menggambarkan realisasi anggaran belanja pada Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu pagu anggaran untuk tahun 2025 adalah senilai Rp. 15.222.113.159 dengan realisasi senilai Rp. 14.432.791.680 sehingga capaian realisasi anggaran belanja adalah 97,05%

BAB IV

PENUTUP

LKJiP Kecamatan Marpoyan Damai ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Marpoyan Damai dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Marpoyan Damai telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2025, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja anggaran tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Akhirnya dengan disusunnya LKJiP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kecamatan Marpoyan Damai, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LKJiP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan cara selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Kecamatan Marpoyan Damai dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Pekanbaru, 05 Februari 2026

CAMAT MARPOYAN DAMAI

KOTA PEKANBARU



FAUZAN, S.STP.,M.Si

NIP. 19800202 199912 1 001

LAMPIRAN

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025

Tabel 5.42 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3.23	80.83	B	BAIK
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.23	80.83	B	BAIK
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3.16	78.88	B	BAIK

V-251

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2025

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 4 : Biaya/Tarif	3.90	97.57	A	SANGAT BAIK
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.29	82.28	B	BAIK
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3.23	80.83	B	BAIK
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3.37	84.22	B	BAIK
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.12	77.91	B	BAIK
Unsur 9 : Sarana dan prasarana	3.84	96.12	A	SANGAT BAIK
IKM	3.38	84.39	B	BAIK

Sumber : Hasil Survey, 2025

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Marpoyan Damai

Tahun 2025

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru** menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,40** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit adanya perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerjanya. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level pimpinan tertinggi (kecamatan). Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	09,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	67,40
Tingkat akuntabilitas Kinerja (Predikat)		B	

Sumber : Kertas Kerja Evaluasi AKIP 2025

c. Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN						TOTAL	KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN		
A. BIDANG PEMERINTAHAN			76	76	74	76	76	70	448	
I	PEMERINTAHAN DESA		55	55	53	55	55	49	322	
1	Sarana Prasarana		20	20	18	20	20	14	112	
		a. Gedung Kantor	4	4	4	4	4	2	22	
		- Ada, Sewa						2	2	KEL PM
		- Ada, Milik Pemda, Permanen	4	4	4	4	4		20	TB, TT, WN, SDT, MH
		b. Gedung Pertemuan	3	3	3	3	3	1	16	
		- Tidak Ada						1	1	PM
		- Ada, Milik Pemda, Permanen	3	3	3	3	3		15	TB, TT, WN, SDT, MH
		c. Perangkat Kelurahan	2	2	2	2	2	2	12	
		- diatas 50% PNS	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		d. Mesin Tik/Komputer	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		e. Kendaraan Dinas Lurah	2	2	0	2	2	0	8	
		- Ada	2	2		2	2		8	TB,TT,SDT,MH
		f. Struktur Organisasi	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		g. Jaringan Listrik	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan (PLN)
		h. Sumber Daya Listrik (PLN)	2	2	2	2	2	2	12	
		- Stabil	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		i. Perpustakaan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
2	Akuntabilitas		3	3	3	3	3	3	18	
		a. Kotak Pengaduan Masyarakat	3	3	3	3	3	3	18	
		- Ada, dan dimanfaatkan	3	3	3	3	3	3	18	Semua Kelurahan
3	Administrasi		32	32	32	32	32	32	192	
		a. Laporan Kinerja Tahunan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		b. Laporan Tahunan Lurah	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		c. Papan Informasi Pelayanan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		d. Loket Pelayanan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		e. Buku Registrasi Pelayanan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		f. Buku Profil Kelurahan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		g. Buku Administrasi Umum	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		h. Buku Administrasi Kependudukan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		i. Buku Administrasi Keuangan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		j. Buku Administrasi Pembangunan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		k. Buku Administrasi Lainnya	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		l. Kartu Uraian Tugas	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		m. Peta Wilayah Kelurahan	4	4	4	4	4	4	24	
		- Ada	4	4	4	4	4	4	24	Semua Kelurahan
		n. Peta Batas Kelurahan	4	4	4	4	4	4	24	
		- Ada	4	4	4	4	4	4	24	Semua Kelurahan
II	KINERJA		10	10	10	10	10	10	60	
1	Kinerja		10	10	10	10	10	10	60	
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat								
		Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat								
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Pembinaan Kemasyarakatan								
		Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat	3	3	3	3	3	3	18	
		- Ada, melakukan forum-forum kebersan	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		- Tidak Ada, reawrd bagi perangkat dan k	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Budaya Kerja	6	6	6	6	6	6	36	
		- Ya, telah mendata kehadiran pegawai se	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		- Ya, telah memiliki standar jam pelayanan	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
		- Ya, sudah memiliki SOP Pelayanan Masy	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN							KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	TOTAL	
	INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
III	1	Inisiatif dan kreativitas	3	3	3	3	3	3	3	18
		a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
	DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/E-GOVERNMENT									
IV	1	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	3	3	3	3	3	3	3	18
		a. Jaringan Internet	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
		- Ada	2	2	2	2	2	2	2	12
		- Tidak Ada	2	2	2	2	2	2	2	12
		b. Website Desa	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
	2	Perangkat Komputer	2	2	2	2	2	2	2	12
		a. Software Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		b. Hardware Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
	3	Administrasi	9	9	9	9	9	9	9	54
		a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi	5	5	5	5	5	5	5	30
		- Tidak Ada (Administrasi umum)	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada (Administrasi kependudukan)	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada (Administrasi keuangan)	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada (Administrasi pembangunan)	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada (Administrasi lainnya)	1	1	1	1	1	1	1	6
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		d. Perpustakaan online	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		e. Internet gratis/HotSpot	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
	V	PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA	5	5	5	5	5	5	5	30
	1	Pelestarian Adat dan Budaya	5	5	5	5	5	5	5	30
		a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
B. BIDANG KEWILAYAHAN			43	43	43	43	43	43	43	258
I INOVASI			31	31	31	31	31	31	31	186
1 Embrio Aktivitas Inovasi			5	5	5	5	5	5	5	30
		a. Adanya produk unggulan	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan.	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif.	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif.	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi.	1	1	1	1	1	1	1	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	1	6

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN							KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	TOTAL	
2	Kelembagaan Inovasi		3	3	3	3	3	3	18	
		a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, cluster)	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	UMKM
		b. Adanya peta rencana (roadmap inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
3	Jejaring Inovasi		5	5	5	5	5	5	30	
		a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes).	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
4	Budaya Inovasi Masyarakat		5	5	5	5	5	5	30	
		a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Lembaga penyedia teknologi.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk.	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
5	Keterpaduan Perencanaan Inovasi		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Adanya integrasi antara peta rencana (roadmap) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah).	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa).	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
6	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (Heksagonal)	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN							KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	TOTAL	
	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan									
7	Potensi secara Inovatif		7	7	7	7	7	7	42	
		a. Spesialisasi Produk Unggulan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		f. Pelatihan Kewirausahaan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
IV	TANGGAP DAN SIAGA BENCANA		8	8	8	8	8	8	48	
1	Perencanaan Kontingensi		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Adanya Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
2	Peta Risiko bencana		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Ketersediaan peta bencana beserta ramburambunya	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		b. Sosialisasi mengenal peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada									
3	Masyarakat		5	5	5	5	5	5	30	
		a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
		e. Alat deteksi dini bencana	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6 Semua Kelurahan
III	PENGATURAN INVESTASI		4	4	4	4	4	4	24	
1	ke Desa dan Kelurahan		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6
C. BIDANG KEMASYARAKATAN			34	34	34	36	34	34	656	
I	PARTISIPASI MASYARAKAT		14	14	14	14	14	14	84	
1	Musyawarah Dusun		8	8	8	8	8	8	48	
		a. Partisipasi Masyarakat	5	5	5	5	5	5	30	30
		- Ada	5	5	5	5	5	5	30	30 Semua Kelurahan
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan	3	3	3	3	3	3	18	18
		- Seimbang	3	3	3	3	3	3	18	18 Semua Kelurahan
	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2									
2	Tahun Terakhir		1	1	1	1	1	1	6	6
		a. Partisipasi Pendanaan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	6	6
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	6

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN							KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	TOTAL	
	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 3 Tahun Terakhir		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun 4 Terakhir		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Aktifitas Gotong Royong Penduduk	4	4	4	4	4	4	24	
		- Ada	4	4	4	4	4	4	24	Semua Kelurahan
II LEMBAGA KEMASYARAKATAN			13	13	13	15	13	13	70	
	1 Organisasi Pemuda		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Aktifitas Organisasi Pemuda	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll		1	1	1	1	1	1	6	
		b. Aktifitas Organisasi Profesi	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
	3 Organisasi Olahraga		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Aktifitas Organisasi Olah Raga	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
	4 LPM atau Sebutan Lain		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Aktifitas LPM	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	Kelompok Gotong 5 Royong		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Aktifitas Kelompok Gotong Royong	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	6 Karang Taruna		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Aktifitas Karang Taruna	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	Lembaga Adat, Budaya, 7 Dan Kesenian		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
	8 Kelompok Usaha		0	0	0	2	0	0	0	
		a. Aktifitas Kelompok Usaha	0	0	0	2	0	0	0	
		- Ada				2			2	Kelurahan Maharatu
	9 Koperasi		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Memiliki Koperasi	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
	9 Organisasi Perempuan		1	1	1	1	1	1	6	
		a. Aktivitas Organisasi Perempuan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Ada	1	1	1	1	1	1	6	
III PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)			7	7	7	7	7	7	42	
	1 Lembaga PKK		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Keberadaan PKK	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	2 Program PKK		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Realisasi 10 Program PKK	2	2	2	2	2	2	12	
		- Terealisasi diatas 1 Kegiatan	2	2	2	2	2	2	12	
	3 Organisasi PKK		3	3	3	3	3	3	18	
		a. Kelengkapan Kelompok Kerja	2	2	2	2	2	2	12	
		- Lengkap	2	2	2	2	2	2	12	
		b. Kelengkapan Kelompok Dasawisma	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak Lengkap	1	1	1	1	1	1	6	
IV KEAMANAN DAN KETERTIBAN			64	64	64	64	64	64	384	
	1 Pengamanan Lingkungan dan Manusia		6	6	6	6	6	6	36	
		a. Kerjasama pelestarian lingkungan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		b. Kerjasama pemanfaatan limbah perusahaan yang ada di desa	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Kerjasama pendaur ulangan limbah	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Petugas keamanan lingkungan (linmas)	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		e. Poskamling	2	2	2	2	2	2	12	
		- Ada	2	2	2	2	2	2	12	Semua Kelurahan
	2 Konflik SARA		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Konflik Antar Kelompok	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	
		b. Konflik Antar Suku	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		c. Konflik Berbau Agama/ Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
		d. Konflik Antar Ras	1	1	1	1	1	1	6	
		- Tidak ada	1	1	1	1	1	1	6	Semua Kelurahan
	3 Perkelahian		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN							KETERANGAN
			KELURAHAN TANGKERANG BARAT	KELURAHAN TANGKERANG TENGAH	KELURAHAN WONOREJO	KELURAHAN MAHARATU	KELURAHAN SIDOMULYO TIMUR	KELURAHAN PERHENTIAN MARPOYAN	TOTAL	
4	Pencurian dan perampokan		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Kasus pencurian/perampokan biasa	2	2	2	2	2	2	12	
		- Tidak ada	2	2	2	2	2	2	12	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan	2	2	2	2	2	2	12	
		- Tidak ada	2	2	2	2	2	2	12	
5	Perjudian		2	2	2	2	2	2	12	
		a. Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus	2	2	2	2	2	2	12	
		- Tidak ada	2	2	2	2	2	2	12	
6	Narkoba		8	8	8	8	8	8	48	
		a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
7	Prostitusi		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
8	Pembunuhan		12	12	12	12	12	12	72	
		a. Jumlah kasus pembunuhan	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk desa setempat	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
9	Kekerasan Seksual		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Jumlah kasus perkosaan	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
10	Kekerasan dalam Keluarga		8	8	8	8	8	8	48	
		a. Kekerasan terhadap anak	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
11	Penculikan		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Jumlah kasus penculikan	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
12	HIV/AIDS		4	4	4	4	4	4	24	
		a. Kasus HIV/AIDS	4	4	4	4	4	4	24	
		- Tidak ada	4	4	4	4	4	4	24	
V	PENDIDIKAN		12	12	12	9	9	9	63	
1	Buta huruf		4	4	4	1	1	1	15	
		a. Penduduk yang tidak bisa baca tulis	4	4	4	1	1	1	15	
		- Tidak ada	4	4	4	1	1	1	15	Semua Kelurahan
2	Putus Sekolah		8	8	8	8	8	8	48	
		a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat	4	4	4	4	4	4	24	
		- Kurang dari 1%	4	4	4	4	4	4	24	
		b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat	4	4	4	4	4	4	24	
		- Kurang dari 1%	4	4	4	4	4	4	24	
VI	KESIHATAN		1	1	1	1	1	0	5	
1	Kematian Bayi		1	1	1	1	1	0	5	
		a. Jumlah Kematian Bayi	1	1	1	1	1	0	5	
		- PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1	1	1	1	1	0	5	Semua Kelurahan
TOTAL			153	153	151	155	153	147	1362	
NILAI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KECAMATAN										227